

MUI Minta Laporan Terhadap Sukmawati Dicabut

Jumat , 13 April 2018 | 07:46

http://www.sinarharapan.co/hukumdanpolitik/read/857/mui_minta_laporan_terhadap_sukmawati_dicabut



Sumber Foto Istimewa
Ketua umum MUI KH Ma'ruf Amin

POPULER

[Mahfud MD: Perintah Penetapan Boediono Tersangka Tidak Langgar Aturan Golkar Petakan](#)
[Kekuatan Pascakeputusan PrabowoBusyro: Penanganan Kasus Novel Memalukan Bangsa](#)
[Abu Tours Kembali Dilaporkan ke Bareskrim Polri](#)
[Aher Prihatin Bupati Bandung Barat Tersangka](#)

JAKARTA--Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin meminta laporan ke Bareskrim Polri terhadap Sukmawati Soekarnoputri dengan dugaan penistaan agama lewat puisi untuk dicabut oleh pelapornya.

"Bapak Ketua Umum mengimbau kepada pihak-pihak yang sudah terlanjur melaporkan Ibu Sukmawati ke Bareskrim Polri, jika memungkinkan untuk mencabut kembali laporannya dan tidak melanjutkan kasusnya," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan imbauan Ketum MUI itu diutarakan oleh Maruf sendiri kepada Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis saat keduanya bertemu di Kantor MUI. "Beliau menyarankan untuk menyelesaikan masalahnya melalui mekanisme musyawarah demi menjaga situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang sedang memasuki tahun politik, agar tercipta ketenangan, kedamaian dan tidak menimbulkan kegaduhan, gesekan dan konik yang berkepanjangan," katanya.

Ketua Umum MUI, menurut dia, juga menjelaskan dalam menangani masalah puisi Sukmawati itu sebaiknya murni dengan pendekatan dakwah, yaitu lebih mendahulukan merangkul bukan memukul dan menuntun bukan menuntut. "Atas penjelasan Ketua Umum MUI tersebut Ustadz Sobri mengucapkan banyak terima kasih dan bisa memahami atas langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Kyai Maruf Amin sebagai ulama sepuh yang memang lebih mendahulukan aspek dakwahnya daripada aspek hukumnya," ujarnya.

Namun, ia mengemukakan, Sobri tetap meminta izin untuk melanjutkan proses hukum Sukmawati karena demi melaksanakan tugas "amar maruf nahi munkar".

Hal itu, dinyatakannya, dijawab Ketua Umum MUI tidak ada masalah karena Indonesia adalah negara hukum dan setiap warga negara diberikan hak untuk menuntut keadilan di depan hukum sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Pertemuan tersebut berjalan kurang lebih satu jam, diwarnai dengan penuh keakraban, saling menghormati dan saling memahami atas peran dan tugasnya masing-masing," ujarnya menambahkan.

Sumber Berita:Antaraneews.com